



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 28 Desember 2020

Halaman: 1

HENTIKAN MOBILITAS BESAR-BESARAN

●Penyebaran Covid-19 Makin Meluas

Peak (puncak) itu jika kasus bisa dikendalikan dan ada penurunan setelahnya. Lah ini kan dibiarkan saja.

YOGYA, TRIBUN - Penularan Covid-19 yang masih terjadi masif di DIY membuat beberapa pihak meminta penghentian mobilitas secara besar-besaran. Epidemiologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKRMIQ) UGM, dr. Riris Andono Ahmad mengatakan, jika melihat parameter kasus harian yang terjadi di DIY, dengan rata-rata per harinya 150-200 kasus, serta *positivity rate* yang mencapai sekitar 18-20 persen, mengindikasikan penyebaran virus ini semakin meluas.

Riris menjelaskan jika sistem kesehatan DIY saat ini sudah menunjukkan peringatan. Menurutnya dari indikator

● ke halaman 11

CORONA TERUS MENYEBAR

- Jumlah rata-rata penularan harian Covid-19 di DIY menyentuh angka 100-200 kasus.
- Bahkan pada Sabtu (26/12) kasus positif mencapai 274.
- Pencegahan virus dengan memakai 3M dinilai sudah tidak ampuh mengawal penyebaran virus semakin masif.
- Data dari DIY, kemarin, tempat tidur critical di RS penanganan Covid-19 hanya menyisakan 10.
- Tempat tidur noncritical, dari total ketersediaan 577, saat ini hanya tersisa 89.
- Hingga kemarin total akumulasi kasus positif di DIY 11.110, dengan kasus sembuh 7.316.
- Sedangkan total kasus meninggal sebanyak 235, dengan tambahan 3 kasus kemarin.

TOTAL KASUS POSITIF	TOTAL KASUS SEMBUH	TOTAL KASUS MENINGGAL	SISA TEMPAT TIDUR NON CRITICAL
11.110	7.316	235	89

GRAFIKS/PIZZA KASIHMAN

Hentikan Mobilitas

● Sambungan Hal 1

tersebut perlu dilakukan langkah yang lebih pasti. Selain itu, Riris juga pesimis jika pengendalian virus hanya dilakukan dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak (3M). "Jadi kalau hanya mengandalkan 3M saja sudah tidak memadai," katanya kepada *Tribun Jogja*, Minggu (27/12).

Alasannya, penerapan 3M sama dengan penggunaan alat pelindung diri (APD). Apabila penyebaran virus sudah sangat tinggi, maka APD yang ada tidak akan cukup mampu menahan. Sebagai langkah pengendalian, Riris menyatakan, perlu menghentikan mobilitas secara masif. Karena itu merupakan satu-satunya cara.

Ia mengatakan, Pemda DIY harus kembali ke langkah

awal penanganan Covid-19 untuk mengendalikan penyebaran, di antaranya penerapan *work from home* (WFH), pembatasan mobilitas, dan kebijakan lainnya. Riris mengakui, saat Juni-Juli lalu Pemda DIY masih bisa mengendalikan penyebaran Covid-19.

"Setelah itu muncul *new normal*. Kebijakan *new normal* ini salah kaprah. *New normal* diartikan kegiatan dibuka, asal seseorang sudah menerapkan proses dirasa aman. Sementara pengawasan tidak ada," ujarnya.

Riris menegaskan, wilayah DIY saat ini masih belum mencapai puncak dari pandemi Covid-19. "*Peak* (puncak) itu jika kasus bisa dikendalikan dan ada penurunan setelahnya. Lah ini kan dibiarkan saja. *Peak* itu ada dua. Karena kasus berhasil dikendalikan dan *herd immunity*. Dan masyarakat kita belum

mencapai itu," pungkasnya.

PSBB

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudianta mendesak agar Pemda DIY perlu mempertimbangkan pembatasan ketat hingga Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) bagi masyarakat.

Selain itu, ia menegaskan agar kantor-kantor atau instansi pemerintah perlu kembali menerapkan WFH. "Sekarang perlu ambil langkah *extraordinary* (luar biasa). Kami mengusulkan kepada Gubernur (DIY) perlu pertimbangan PSBB," jelasnya.

Politikus PKS ini mengatakan, saat ini kasus Covid-19 di DIY sudah masuk ke dalam kondisi luar biasa. Oleh karena itu, pengendalian mobilitas manusia sangat diperlukan dengan dua cara tersebut. "*New normal* ini harus dikendalikan. Ya, salah satunya pengereman mobili-

tas manusia," terang dia.

Huda menambahkan, data yang ada saat ini menurutnya angka penambahan kasus positif lebih tinggi dibandingkan dengan angka kesembuhan kasus Covid-19. Melihat fakta tersebut, pihaknya sangat menginginkan agar Pemda DIY sudah saatnya mengambil kebijakan yang tegas.

"Penambahan jauh lebih tinggi dari yang sembuh. Ini mengkhawatirkan, dan DIY ini kan tidak pernah ada pembatasan sama sekali. Tolonglah dipertimbangkan," tambahnya.

Respons DIY

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarman Baskara Aji belum bisa memberikan tanggapan lebih jauh mengenai usulan pembatasan mobilitas besar-besaran DIY. "Itu menjadi masukan untuk bahan pertimbangan gugus tugas (penanganan Covid-19) DIY," ucapnya. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005